

# SISTEM EKONOMI KERAKYATAN DALAM GLOBALISASI PEREKONOMIAN

Wahyu Bhudianto

## *Abstract*

*Regional economic development is a process by which local governments and communities to manage resources - resources and form a partnership with local government , private sector to create a new jobs and stimulate the development of economic activity (economic growth) in the region. . Regional economic development is a process that includes the formation of new institutions, the development of alternative industries, improvement of existing workforce capacity to produce better products and services, identifying new markets, transfer of knowledge and technology, and development efforts new.*

*In the current era of regional autonomy, the concept of community economic development system must be translated into operational programs based on the domestic economy at the county level and city with a high degree of independence. It should be emphasized that the development of community economic system in the current era of regional autonomy should not be interpreted in a territorial perspective, but should be developed in the perspective of regionalization in which it is integrated in the potential unity, excellence, opportunity, social and cultural character. the Populist economic system should be able to empower local communities and improve the Regional Economic Development.*

***Keywords: Globalization, Populist , The economic system***

---

## **Pendahuluan**

Banyak pakar dan para ahli mengartikan sistem sebagai kesatuan yang terpadu secara holistik yang didalamnya terdiri atas bagian – bagian, dan tiap – tiap bagian memiliki ciri dan batas tersendiri. Suatu sistem pada dasarnya merupakan organisasi besar yang menjalin berbagai subyek / obyek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subyek / obyek pembentuk sebuah sistem dapat berupa orang-orang atau masyarakat yang menggunakan perangkat kelembagaan.

Berbagai upaya untuk merumuskan sistem ekonomi khas Indonesia ternyata tidak semudah memberikan label semacam sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi

rakyat atau sistem ekonomi liberal. Sesungguhnya persoalan – persoalan ekonomi pada hakekatnya adalah masalah transformasi atau pengolahan alat – alat / sumber penentu / pemuas kebutuhan yang berupa faktor – faktor produksi, yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam dan keterampilan menjadi barang dan jasa.. Sistem Ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi dengan antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam tatanan kehidupan.

Sistem ekonomi suatu negara dikatakan bersifat khas sehingga dibedakan dari sistem ekonomi yang berlaku atau diterapkan dinegara lain, hal ini berdasarkan beberapa sudut tinjauan: (1) Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor

produksi; (2) keluwesan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain dan untuk menerima imbalan atas prestasi kerjanya; dan (3) kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya ( Ai Siti Farida, SE, S.Si, 2010 ).

Perihal sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia sering menjadi pertanyaan, sistem ekonomi apa yang diterapkan di Indonesia ? bagaimana sistem ekonomi Indonesia berperan dalam pemberdayaan masyarakat di era otonomi daerah ? dan mampukah Sistem ekonomi kerakyatan bersaing dalam globalisasi perekonomian ?

Setiap negara memiliki sistem ekonomi. Pilihan terhadap sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara bergantung pada kesepakatan nasional negara tersebut. Biasanya kesepakatan nasional ini berdasarkan undang – undang dasar yang dimiliki, disamping itu ada falsafah dan ideologi negara yang mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara. Bertolak dari pemahaman dasar mengenai makna dan hakekatnya secara teoritis, Sistem Ekonomi dapat dikatakan sebagai keseluruhan lembaga – lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan oleh suatu bangsa / negara dalam mencapai cita – cita yang telah ditetapkan. ( Drs. Subandi, MM, 2011 ).

Pengertian lain menjelaskan bahwa Sistem Ekonomi adalah strategi suatu negara mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran.( Ai Siti Farida, SE, M.Si , 2010 ). Sistem Ekonomi adalah sistem sosial atau kemasyarakatan yang dilihat dalam rangka usaha keseluruhan sosial yang untuk mencapai kemakmuran. Terkandung unsur – unsur: (1) Tujuan

bersama dengan harapan yang melahirkan kebiasaan, tradisi, kaidah, aturan yang melembaga; (2) Seperangkat nilai yang melekat pada tujuan bersama tersebut dan menciptakan pengikat yang mempersatukan anggota masyarakat dalam usaha bersama menurut cara-cara tertentu; (3) Sikap dasar dan pengertian tentang hak dan kewajiban.

Gregory Grossman dalam P. Rahardja dan M. Manurung (2004) mengatakan bahwa yang dimaksud sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen – komponen atau unsur – unsur terdiri atas unit – unit dan agen – agen ekonomi serta lembaga – lembaga ( institusi ) ekonomi, yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu saling menopang dan mempengaruhi. Dumairy ( 1996 ) mengatakan bahwa suatu Sistem Ekonomi tidaklah berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan: (1) falsafah; (2) pandangan hidup masyarakat; (3) pola hidup masyarakat; (4) idiologi.

Sistem Ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam suatu supra sistem kehidupan masyarakat disuatu negara. Didunia ini terdapat kecenderungan secara umum bahwa Sistem Ekonomi disuatu negara ” bergandengan tangan ” dengan Sistem Politik di negara yang bersangkutan. Secara umum dapat digambarkan unsur – unsur sistem ekonomi dan unsur – unsur sistem politik sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Sistem Ekonomi dan Sistem Politik**

Kutub A	Kontek Pengkutuban	Kutub Z
Liberalisme	Ideologi Politik	Komunisme
Demokrasi	Rezim Pemerintahan	Otokrasi
Egalitarianisme	Penyelenggaraan Kenegaraan	Etatisme
Desentralisasi	Struktur Birokrasi	Sentralisasi
Kapitalisme	Ideologi Ekonomi	Sosialisme
Mekanisme Pasar	Pengelolaan Ekonomi	Perencanaan Terpusat

Sumber : Dumairy, 1996

Pada negara – negara yang berideologi politik leberalisme dengan rezim pemerintahan yang demikratis, pada umumnya menganut ideologi ekonomi kapitalisme dengan pengelolaan ekonomi yang berlandaskan pada mekanisme pasar. Dinegara ini penyelenggaraan kenegaraannya bersifat egaliter dan struktur birokrasinya desentralistis. Sedangkan negara – negara yang berideologi politik komunisme denganrezim pemerintahan yang otoriter, ideologi ekonominya cenderung sosialisme, dengan pengelolaan perekonomian berdasarkan perencanaan terpusat, dinegara-negara ini penyelenggaraan kenegaraannya cenderung bersifat etatisme dengan struktur birokrasi yang sentralistis.

Perbedaan sistem ekonomi terjadi lebih disebabkan karena perbedaan nilai – nilai hidup antara suatu kelompok masyarakat atau negara. Faktor – faktor yang mempengaruhi pemakaian suatu sistem ekonomi antara lain :

1. Faktor Intern, meliputi: (lembaga ekonomi, lembaga sosial, lembaga ide, kebijakkan pemerintah)
2. Faktor Ekstern, meliputi : (keadaan politik, falsafah negara, hukum yang berlaku, politik luar negeri).

### Macam - Macam Sistem Ekonomi

Di dunia terdapat bermacam – macam Sistem Ekonomi yang dapat diklasifikasikan beberapa cara yaitu: (1) Dilihat dari mekanisme koordinasinya, sistem ekonomi dibedakan dalam tiga kategori, yaitu: sistem tradisi, sistem komando, dan sistem pasar; (2) Dilihat berdasarkan penekanan hak kepemilikan yang berlakukan, terdapat sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi kapitalis. Secara umum Sistem Ekonomi dikelompokkan menjadi tiga bentuk , yaitu : Sistem Ekonomi Liberalis-kapitalistik, Sistem Ekonomi sosialis-komunistik dan Sistem Ekonomi Campuran ( Mixed Economy).

1. Sistem Ekonomi Liberal-Kapitalis.

Sistem Ekonomi Liberalis-Kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individu atas sumber daya ekonomi atau faktor – faktor produksi. Pada sistem ekonomi ini terdapat keleluasaan bagi perseorangan untuk memiliki sumber daya, seperti kompetensi antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup persaingan antar badan usaha dalam mencari keuntungan. Prinsip keadilan yang dianut adalah setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi

kerjanya. Campur tangan pemerintah sangat minim. Sistem ini menyandarkan diri pada mekanisme pasar, berdasarkan prinsip *Laissez Faire* (persaingan bebas) dan menyakini kemampuan ( *the invisible hand* ) dalam menuju efisiensi ekonomi.

## 2. Sistem Ekonomi Sosialis-komunistik

Dalam Sistem Ekonomi sosialis-komunistik adalah sumber daya ekonomi atau faktor produksi dikuasai sebagai milik negara. Menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam menjalankan dan memajukan perekonomian. Imbalan yang diberikan pada perseorangan didasarkan pada kebutuhannya, bukan berdasarkan jasa yang diberikannya. Prinsip keadilan yang dianut ialah setiap orang menerima imbalan yang sama. Campur tangan pemerintah sangat tinggi. Semua alat produksi adalah milik bersama/negara. Sistem ekonomi dikendalikan melalui perencanaan terpusat.

## 3. Sistem Ekonomi Campuran (*Mixed Economy*)

Sistem Ekonomi campuran pada umumnya diterapkan pada negara – negara berkembang atau negara – negara dunia ketiga. Dalam praktiknya Sistem Ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia mengandung unsur – unsur Kapitalisme dan Sistem Sosialisisme dalam pengorganisasian sistem ekonominya. Untuk melihat kadar isme tersebut mewarnai Sistem Ekonomi Indonesia dapat dilihat dari dua pendekatan yakni : pendekatan faktual struktural yakni menelaah peranan pemerintah/negara dalam struktur perekonomian dan pendekatan historis yakni menelaah sejarah perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu. ( Drs. Subandi, MM, 2011 ).

## **Sistem Ekonomi Kerakyatan**

Sistem Ekonomi Kerakyatan berlaku di Indonesia sejak terjadinya Reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah bertekad melaksanakan Sistem Ekonomi Kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah Sistem Ekonomi Kerakyatan.

Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. (Prof. Dr. Mubyarto, 2002 )

Pada Sistem Ekonomi Kerakyatan, masyarakat memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Sistem Ekonomi Kerakyatan mempunyai ciri-ciri berikut ini: (1) Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat; (2) Memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup; (3) Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; (4) Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja; dan (5) Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat. (Arini Nurmala Sari, 2011)

Sistem ekonomi kerakyatan sendiri utamanya adalah UUD 1945 pasal 33 ayat (1), (2), dan (3). Bentuk usaha yang sesuai

dengan ayat (1) adalah koperasi, dan bentuk usaha yang sesuai dengan ayat (2) dan (3) adalah perusahaan negara. Adapun dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi “hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan seorang”. Hal itu berarti perusahaan swasta juga mempunyai andil di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dengan demikian terdapat tiga pelaku utama yang menjadi kekuatan sistem perekonomian di Indonesia, yaitu perusahaan negara (pemerintah), perusahaan swasta, dan koperasi. Ketiga pelaku ekonomi tersebut akan menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebuah sistem ekonomi akan berjalan dengan baik jika pelaku-pelakunya dapat saling bekerja sama dengan baik pula dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian sikap saling mendukung di antara pelaku ekonomi sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan.

Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya. Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi melaksanakan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dan di bawah pimpinan dan penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang seorang. Maka kemiskinan tidak dapat ditoleransi sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan harus memberi manfaat pada mereka yang paling miskin dan paling kurang sejahtera

### **Globalisasi Perekonomian**

Menurut asal katanya, kata "globalisasi" diambil dari kata global, yang

maknanya ialah *universal*. Achmad Suparman menyatakan Globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja (*working definition*), sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.

Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa., sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuk yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab, globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain seperti budaya dan agama.

Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa.

Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik.

Menurut Tanri Abeng, perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut:

1. Globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global.
2. Globalisasi pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi (baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung) di semua negara di dunia.
3. Globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi maka *human movement* akan semakin mudah dan bebas.

4. Globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui: TV, radio, media cetak dll.
5. Globalisasi Perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan *nontarif*. Dengan demikian kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan *fair*.

Dampak Positif Globalisasi Ekonomi, antara lain: (1) produksi global dapat ditingkatkan; (2) meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara; (3) meluaskan pasar untuk produk dalam negeri; (4) dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi lebih baik; (5) menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi;

Sedangkan dampak negatif globalisasi ekonomi, dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) menghambat pertumbuhan sektor industri; (2) memperburuk neraca pembayaran; (3) sektor keuangan semakin tidak stabil; dan (4) memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang

### **Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Globalisasi Perekonomian**

Dalam Globalisasi Perekonomian pengembangan ekonomi rakyat merupakan keniscayaan bagi bangsa Indonesia sebagai mana upaya demokratisasi yang merupakan kecenderungan global juga. Momentum pengembangan ekonomi rakyat ini semakin tampak sejalan dengan pergantian rezim di Indonesia dan berubahnya paradigma pembangunan yang diterapkan sebelumnya. Oleh karena itu diyakini akan terjadi proses

perubahan politik – ekonomi secara signifikan yang mendorong demokrasi dan pengembangan ekonomi rakyat agar proses pembagian kekuasaan ekonomi politik menjadi relatif berimbang. Perubahan ini tentunya akan mempercepat laju berbagai tuntutan masyarakat menghendaki bahwa keberlanjutan pembangunan ekonomi mensyaratkan partisipasi masyarakat yang lebih luas.

Sistem Ekonomi Kerakyatan merupakan aturan main baru perekonomian Nasional Indonesia. Reformasi menuju ekonomi kerakyatan dilaksanakan berdasar azas kerakyatan serta prinsip dasar dari program – program pemberdayaan ekonomi rakyat. Tujuan ekonomi Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia masih hidup dalam keterbelakangan dan kemiskinan sehingga menjadi acuan pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan supaya tidak terlindas oleh globalisasi perekonomian.

Reformasi ekonomi mempunyai tujuan kembar yaitu meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sekaligus menghapus berbagai ketidakadilan ekonomi dengan tujuan akhir terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sistem Ekonomi Pancasila atau Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam menghadapi globalisasi Perekonomian dijalankan berdasarkan prinsip – prinsip etik dalam 7 butir paradigma yaitu: (1) harus menyumbangkan terciptanya ketahanan ekonomi nasional yang kukuh dan tangguh; (2) harus mengandung sikap dan tekad kemandirian dalam diri manusia, keluarga dan masyarakat Indonesia; (3) perekonomian nasional harus dikembangkan ke arah perekonomian yang berkeadilan dan berdaya saing tinggi; (4) demokrasi ekonomi harus

diwujudkan untuk memperkuat struktur usaha nasional; (5) koperasi adalah sakaguru perekonomian nasional, sebagai gerakan dan wadah kegiatan ekonomi rakyat, koperasi sebagai badan usaha ditujukan pada penguatan dan perluasan basis usaha; (6) kemitraan usaha yang dijiwai semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang saling menguntungkan harus ditumbuhkembangkan; (7) usaha nasional harus dikembangkan sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi pasar terkelola dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta nasionalisme yang tinggi ( Mubyarto, 1999 ).

Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam pergumulan pada globalisasi Perekonomian harus dapat berjalan pada aturan main keadilan ekonomi yang bersumber pada Pancasila antara lain:(1) roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan moral; (2) seluruh warga masyarakat bertekad untuk mewujudkan pemerataan sosial yaitu tidak membiarkan adanya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial; (3) seluruh pelaku ekonomi yaitu produsen dan pemerintah (yang bisa bertindak baik sebagai produsen maupun konsumen ), selalu bersemangat nasionalistik, yaitu dalam setiap putusan-putusan ekonominya menomorsatukan tujuan terwujudnya perekonomian yang tangguh dan kuat; (5) koperasi dan bekerja secara kooperatif selalu menjiwai pelaku ekonomi warga masyarakat. Demokrasi ekonomi atau Ekonomi Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan; (5) Dalam perekonomian nasional yang amat luas, terus menerus diupayakan adanya keseimbangan **antara perencanaan ekonomi nasional** dengan

**peningkatan desentralisasi serta otonomi daerah.** Hanya melalui partisipasi daerah secara aktif aturan main keadilan sosial ekonomi bisa berjalan yang selanjutnya menghasilkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Mubyarto, 1999).

## **Penutup**

Berlakunya Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, maka terjadi pergeseran dalam pembangunan ekonomi yang tadinya bersifat sentralistik, mengarah pada desentralisasi yaitu dengan memberi keleluasaan kepada daerah untuk membangun wilayahnya termasuk pembangunan dalam bidang ekonominya. Penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan dan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka mempertahankan dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan azas kerakyatan, maka sistem ekonomi kerakyatan hendaknya dapat memberdayakan masyarakat daerah dan meningkatkan pembangunan ekonomi daerah.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya – sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan anantara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi ( pertumbuhan ekonomi ) dalam wilayah tersebut. ( Lincoln Arsyad, 2000 ). Selanjutnya Lincoln Arsyad juga mengatakan bahwa Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan Institusi-institusi baru,

pembangunan industri-industri alternatif,perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru,alih pengetahuan dan tehnologi, serta pembangunan usaha-usaha baru.

Pokok permasalahan yang ada didalam Pembangunan Ekonomi Daerah terletak pada kebijakan – kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik secara lokal daerah. Oreientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif – inisiatif yang berasal dari daerah dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Permasalahan dalam Pembang-unan Ekonomi Daerah adalah: Ketimpangan pembangunan sektor Industri, kurang meratanya investasi,tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah, perbedaan sumber daya alam, perbedaan demografi dan kurang lancarnya perdagangan antar daerah. Lincoln Arsyad (2000), mengatakan bahwa ada empat peran yang dapat diambil oleh Pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi di daerah, yaitu : entrepreneur, koordinasi dan stimulator untuk melakukan inisiatif dan inovatif dalam pembangunan di daerah. Agar pean pemerintah dapat berjalan dengan baik secara garis besar ada strategi pembangunan ekonomi daerah yaitu : Strategi pengembangan fisik, Strategi pengembangan dunia usaha, Strategi pengembangan sumberdaya manusia dan Strategi pemberdayaan & pengembangan masyarakat.

Pada era otonomi daerah saat ini, konsep pengembangan Sistem ekonomi

kerakyatan harus diterjemahkan dalam bentuk program operasional berbasis ekonomi domestik pada tingkat kabupaten dan kota dengan tingkat kemandirian yang tinggi. Namun demikian perlu ditegaskan bahwa pengembangan Sistem ekonomi kerakyatan pada era otonomi daerah saat ini tidak harus diterjemahkan dalam perspektif teritorial, tapi sebaiknya dikembangkan dalam perspektif regionalisasi di mana di dalamnya terintegrasi kesatuan potensi, keunggulan, peluang, dan karakter sosial budaya.

Subandi, (2011), *Sistem Ekonomi Indonesia*, Alfabeta

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ai Siti Farida, SE, MM, *Sistem Ekonomi Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2011

Arini Nurmala Sari, (2011), *Sistem Ekonomi Kerakyatan Melalui wadah Gerakan koperasi Indonesia*.

Anggito Abimanyu, (2000) *Ekonomi Indonesia Baru*, Elex Media Komputindo.

Dumairy, (1997) *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta

Julius Bobo, SE, MM, (2003) *Transformasi Ekonomi Rakyat*, Cidesindo

Lincoln Arsyad, (2000), *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE, Yogyakarta.

Mubiyarto, (1999), *Reformasi Sistem Ekonomi (Dari Kapitalisme menuju Ekonomi Kerakyatan)* Aditya Media

Mubyarto, (2002), *Makalah untuk Konperensi Nasional Pengembangan Sosial Ekonomi*, Yogyakarta, 2002